

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA DERAJAT  
DESENTRALISASI FISKAL DAN UPAYA MENINGKATKAN  
PRNDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)**

**SKRIPSI**



**Nama : Baiti Janati  
NIM : 222015249**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA DERAJAT  
DESENTRALISASI FISKAL DAN UPAYA MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Baiti Janati  
NIM : 22 2015 249**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS 2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

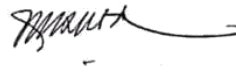
**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Derajat  
Desentralisasi Fiskal dan Upaya Meningkatkan Pendapatan  
Asli Daerah (Studi pada Pemerintahan Daerah Provinsi  
Selatan)  
Nama : Baiti Janati  
NIM : 22 2015 249  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan disahkan  
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



H.M. Basvaruddin, S.E., Ak., M.Si  
NIDN/NBM: 0003055605/784024

Mizan, S.E., Ak., M.Si  
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui,  
Dekan  
Prodi Akuntansi



Beiri, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Baiti Janati

NIM : 222015249

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakkan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Penulis



Baiti Janati

## **ABSTRAK**

**Baiti Janati/222015249/2019/ Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal dan Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) / Akuntansi Sektor Publik**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Faktor-Faktor apa yang menyebabkan rendahnya derajat desentralisasi fiskal pada pemerintahan provinsi Sumatera Selatan dan Bagaimanakah upaya meningkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya derajat desentralisasi fiskal dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan yaitu data primer. Metode pengumpulan data dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian derajat desentralisasi fiskal pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2014-2018 rata-rata derajat desentralisasi fiskal yaitu 38,65% masih tergolong cukup rendah. Faktor penyebab rendahnya derajat desentralisasi fiskal yaitu peran BUMD Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan kurang berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, faktor lainnya yaitu tingginya sentralisasi dalam bidang perpajakan, sedikitnya pajak daerah yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah, adanya kekhawatiran pemerintah pusat, serta kenaikan DAU sebagai kenaikan tanggungjawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan upaya meningkatkan PAD terdapat dua cara yaitu Intensifikasi dan ekstensifikasi.

**Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

*Abstract*

*Baiti Janati-222015249/2019: A Factorial Analysis of Causing the Low Degree of Fiscal Decentralization and Efforts To Increase Local Own-Source Revenues (Study on the Regional Government of South-Sumatera Province) / Public Secroe Accounting*

*This research is formulated on what factor caused the low degree of fiscal decentralization in the regional government, South-Sumatera province and how to improve the ability of the region to increase local revenue in the regional government South-Sumatera province. The data source used was primary data. Documentation method used to collect the data. The data analysis technique used in this research was the analysis of comparative qualitative data. The result of the research were the degree of fiscal decentralization of the government of south sumatera within 2014-2018 the average degree of decentralization of 38,65% is still quite low. Contributing factors to the low degree of fiscal decentralization was the role of BUMD in the government province south sumatera less role in obtaining local original income and the reason was the general laziness of the BUMD itself. Another factors was that the high centralization in the taxation field, at least regional taxes that can relied upon as a source of regional income, there was a concern of the central government if local government have high financial resources so there was a tendency for disintegration and separatism to occur, as well as the increase in the DAU as an increase in the responsibilities imposed by the central government to regional government.*

*Keywords : Decentralization Fiscal local revenue (PAD)*

PENGESAHAN  
NO. 535 /Abstract I B U M P/ VIII / 2019  
Telah di Koreksi oleh  
Lembaga Bahasa  
Universitas Muhammadiyah Palembang

## PRAKATA



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal dan Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah menetapkan otonomi daerah seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagai konsekuensinya daerah otonomi mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembangunan daerah harus diarahkan untuk mengembangkan daerah demi terciptanya kemandirian sebuah daerah. Dalam penerapan otonomi daerah haruslah perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta akuntabilitas untuk mempertahankan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Rendahnya derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan kemampuan daerah provinsi Sumatera Selatan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah masih tergolong rendah dan kemampuan

keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan belum siap dalam melaksanakan otonomi daerah serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orangtua (Bapak Burhannudin dan Ibu Tanzilah) beserta kedua Kakakku yang berdo'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak H.M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si dan Bapak Mizan, S.E., M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si.,selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, S.E., M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik Paket 17.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.



6. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Pihak Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
8. Keluarga Besarku yang selalu mensupport agar selalu semangat dan tak lupa berdoa agar diberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini
9. Sahabat-sahabat terdekatku Deri Amzar, Heni, Rizah, Riki, Alif, Haris, dan Andri.
10. Serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu support dan kasih semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang,        Juli 2019

Penulis

**Baiti Janati**

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
<b>HALAMANDEPAN/COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAIGIAT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAH</b> .....	v
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	vi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>10</b>
<b>A. Landasan Teori</b> .....	10
1. Desentralisasi Fiskal.....	10
a. Pengertian Desentralisasi Fiskal.....	10
b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	11
c. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal.....	11
d. Prinsip Desentralisasi Fiskal.....	12
2. Pendapatan Asli Daerah.....	13
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	13
b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	14
c. Upaya Meningkatkan PAD.....	15

B. Penelitian Sebelumnya.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Operasionalisasi Variabel.....	21
D. Data yang Diperlukan.....	21
E. Metode Pengumpulan Data.....	22
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>25</b>
1. Sejarah Singkat BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	25
a. Visi dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	26
b. kelembagaan.....	27
1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK).....	27
2) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	29
<b>B. Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>	<b>47</b>
1. Analisis Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.....	48
2. Analisis Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>61</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### halaman

Tabel I.1	Pesentase Tingkat Kinerja Keuangan Pemerintahan Berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal.....	6
Tabel I.2	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal .....	6
Tabel II.1	Persentase Tingkat Kinerja Keuangan Pemerintahan Berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal.....	11
Tabel II.2	Penelitian Sebelumnya .....	19
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	21
Tabel IV.1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.....	50
Tabel IV.2	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.....	55
Tabel IV.3	Target dan Relisasi Pendapatan Retribusi Daerah .....	56
Tabel IV.4	Anggaran dan Realisasi PAD.....	57
Tabel IV.5	Anggaran dan Realisasi PAD yang Sah .....	58

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar IV.1.....	27

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Laporan Keuangan
- Lampiran 2 Lembaran Persetujuan Skripsi Plagiarism
- Lampiran 3 Checker X Originality Report Surat
- Lampiran 4 Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 5 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Fotocopy sertifikat AIK
- Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat Toefl
- Lampiran 8 Biodata

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan.

Berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah menetapkan otonomi daerah seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagai konsekuensinya daerah otonomi mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembangunan daerah harus diarahkan untuk mengembangkan daerah demi terciptanya kemandirian sebuah daerah. Dalam

penerapan otonomi daerah haruslah perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta akuntabilitas untuk mempertahankan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerahnya.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan bernegara, dan merupakan salah satu komponen dari administrasi publik, karena salah satu tujuan desentralisasi fiskal yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu, administrasi publik merupakan alat, wadah atau tempat dalam mewujudkan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berkaitan langsung dengan hubungan pemerintah dalam penerimaan dan pengeluaran dana publik antara tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan yang dibawahnya.

Desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka dan melakukan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan untuk meningkatkan kesetaraan perkembangan lokal, sesuai dengan motivasi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah mereka berdasarkan potensi khusus mereka.

Adanya desentralisasi fiskal dimaksudkan daerah mempunyai kewenangan dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri, mengelola keuangannya sendiri, dan mempergunakannya sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus



mampu melaksanakan tugasnya dengan baik yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber pendapatan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada dasarnya, kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang. Sehingga mampu mencapai target sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri.

Menurut Mahmudi (2006:121) menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masi tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan didaerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah memberikan pelayanan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya

Mardiasmo (2013:182) mengatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam

melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.

Kementerian Dalam Negeri dengan program "*good and clean government*" melakukan evaluasi atas prestasi dan kinerja pemerintah daerah secara Nasional. Sasaran evaluasi dan penilaian ada 33 pemerintah daerah provinsi, 397 pemda kabupaten dan 93 pemerintah kota. Hasil evaluasi dan penilaian kinerja pemda tersebut ditetapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melalui Kepmendagri Nomor 100-53 Tahun 2018 tanggal 1 Januari 2018, tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator kinerja keuangan Pemda meliputi indikator input, proses, output, dan indikator impact. Karakteristik Pemerintah Daerah sebagai *pure non profit organization* menempatkan organisasi ini mempunyai keunikan yang sangat berbeda dengan perusahaan bisnis. Pemda mempunyai tanggung jawab besar di bidang

ekonomi dan sosial secara bersama. Karena itu pengukuran kinerja keuangan Pemda harus mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi dan sosial secara komprehensif yang mencakup: kondisi ekonomi Nasional, lingkungan bisnis, stabilitas dan pengembangan, kesehatan dan pendidikan di daerah. Untuk kategori Pemerintah Daerah (pemda) tingkat provinsi, Jawa Timur berada pada peringkat tertinggi, disusul Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dari 397 pemerintah daerah kabupaten, ditetapkan 10 besar yang berprestasi paling tinggi yakni kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, Karanganyer, Banyuwangi, Malang, Pasuruan, Kuningan, Kudus, Bulukumba dan kabupaten Bone. Sedangkan Kategori pemerintah kota, 10 besar peringkat tertinggi dari 93 kota diperoleh: kota Malang, Makassar, Surabaya, Blitar, Gorontalo, Semarang, Bandung, Tangerang, Samarinda dan Parepare.

Berdasarkan evaluasi di atas prestasi dan kinerja keuangan pemerintah daerah secara Nasional, Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta Kabupaten dan Kotanya tidak termasuk dalam kategori pemerintahan daerah dengan prestasi tertinggi di Indonesia.

Sebagai tolak ukurnya, kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan baik atau buruknya dapat diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Menurut Mahmudi (2016:169). Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total

penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat ke siapan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio derajat desentralisasi fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

**Tabel I.1**  
**Persentase Tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah**  
**Berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal**

<b>Persentase (%)</b>	<b>Kategori</b>
0,00%-10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Baik
≥ 50,00%	Sangat baik

Sumber: Badan Litbang Depdagri pada tahun 1991  
(Dalam Siti Nur Qomariyah), 2019

**Tabel I.2**  
**Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

<b>Tahun</b>	<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>Pendapatan Asli C Daerah (PAD)</b>	<b>(%)</b>	<b>Kategori</b>
2014	6.252.136.312.521	2.422.673.788.769	38,74 %	Cukup
2015	5.990.424.062.512	2.534.526.413.315	42,30%	Baik
2016	6.582.780.929.676	2.546.177.544.349	36,67%	Cukup
2017	8.195.968.131.800	3.031.633.624.304	36,98%	Cukup
2018	9.141.371.395.009	3.528.010.712.183	38,59%	Cukup

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2019

Dilihat dari tabel I.2 diatas derajat desentralisasi fiskal keuangan pemerintahan provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal 38,65%, artinya kemampuan daerah provinsi Sumatera Selatan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah masih tergolong cukup dan kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan belum siap dalam melaksanakan otonomi daerah, dikarenakan rata-rata rasio derajat desentralisasi tidak mencapai 50%. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014-2018 masih relatif kecil dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah. Dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pemerintahan provinsi Sumatera Selatan masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Sesuai dengan Landasan hukum dari kebijakan desentralisasi termasuk dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal tinggi jika telah mencapai 50%.

Derajat desentralisasi fiskal yang kecil secara langsung juga dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah yang kecil. Dari sisi pemerintahan lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Inovasi dan kreatifitas daerah sangat diperlukan sehingga komponen-komponen pendapatan asli daerah yang menjadi konsentrasi pemerintah daerah tidak hanya bersumber dari pajak dan retribusi.

Sejalan dengan permasalahan diatas penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Nurqomariyah (2018) yang berjudul Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Jombang. Desain kajian ini

menggunakan kuantitatif analisis dan deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Jombang selama kurun waktu 2012-2016 serta mengukur derajat kepekaan penerimaan daerah PAD karena adanya perubahan PDRB. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata derajat desentralisasi fiskal PAD sebesar 13,24% dengan kriteria kurang. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak hanya sebesar 4,92% dengan kriteria sangat kurang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang berjudul **“Analisis Faktor- Faktor Penyebab Rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal dan Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan rendahnya derajat desentralisasi fiskal pada pemerintahan provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimanakah upaya meningkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan rendahnya derajat desentralisasi fiskal pada pemerintahan provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya peningkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berfikir dalam memperluas pengetahuan tentang faktor penyebab rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal dan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

b. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah tentang faktor penyebab rendahnya derajat desentralisasi fiskal dan menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Almamater

Hasil Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
- Ardon dan Ventje. (2018). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bitung*. Jurnal EMBA.Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 278-288.
- Badan Analisa Fiskal. Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2002. Bunga Rampai Kebijakan fiskal.
- Baldric Siregar. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Kuncoro. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Mahmudi. (2006). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Qomariyah Siti Nur. 2018. *Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Jombang*. VOL. 2 No.1 Mei 2018 Hal. 1-21
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmo dan Theresia. (2010) *perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi
- Supriyadi, *Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo*, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 1, Juli 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2015 tentang *pemerintahan daerah*.
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Cv Pustaka Setia.



Viozona. 2018. *Analisis derajat desentralisasi dan kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi*. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 5. No.1, Januari – April 2016 ISSN: 2303-1255.